

IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR DI SMP NEGERI 2 MAIWA KABUPATEN ENREKANG

Suci Amalia^{1*}, Abdi², Haerana³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aims to determine the implementation of the Smart Indonesia Program in SMP Negeri 2 Maiwa, Enrekang Regency by using a qualitative research type descriptive method. Informants consist of 13 people. Research data obtained through observation, interviews and documentation. Validation of the data by triangulation of sources, techniques and time then analyzed through data reduction techniques, data presentation and drawing conclusions. The results of the study indicate that the implementation indicators in this study are supported by four interrelated aspects, namely : 1) communication between implementers in encouraging the success of PIP policies has gone well but is still not effective, 2) resources, human resources and non-human resources are good, 3) disposition has been going well seen from how the implementing party provides services and information optimally, 4) the bureaucratic structure has not been fully functioning properly, which involves more than one bureaucratic structure, each party having different operational standards.

Keywords: policy implementation, smart indonesia program

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 2 Maiwa Kabupaten Enrekang dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif metode deskriptif. Informan terdiri dari 13 orang. Data penelitian didapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengabsahan data dengan triangulasi sumber, teknik dan waktu kemudian dianalisis melalui teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator Implementasi dalam penelitian ini didukung oleh empat aspek yang saling terkait, yaitu : 1) komunikasi antara pelaksana dalam mendorong keberhasilan kebijakan PIP sudah berjalan dengan baik tapi masih kurang efektif, 2) sumber daya, sumber daya manusia dan sumber daya non manusia sudah baik, 3) disposisi sudah berjalan dengan baik dilihat dari bagaimana pihak pelaksana memberikan pelayanan dan informasi secara maksimal, 4) struktur birokrasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik yang mana didalamnya melibatkan lebih dari satu struktur birokrasi yang masing-masing pihak memiliki standar operasional berbeda.

Kata kunci: implementasi kebijakan, program indonesia pintar

* suciamalia@gmail.com

PENDAHULUAN

Pada bulan Februari tahun 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP). PIP adalah Program Indonesia Pintar berupa bantuan uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Permendikbud 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) menjangkau Peserta Didik dari tingkat dasar hingga tingkat Perguruan Tinggi. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat agar memperoleh layanan Program Indonesia Pintar (PIP) salah satunya yaitu melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan program bantuan tunai pendidikan yang diberikan kepada anak usia sekolah, namun berasal dari keluarga yang di pandang kurang mampu secara

ekonomi. Program ini merupakan penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang sebelumnya pernah ada. Program Indonesia Pintar dengan KIP sebagai fasilitasnya dalam penyelenggaraannya dilakukan oleh 2 lembaga kementerian, yaitu Kemendikbud dan Kementerian Agama (Kemenag). Apabila dilihat secara fisik, KIP menjadi bukti atau identitas jaminan dan kepastian bagi semua anak usia sekolah dan telah terdaftar sebagai penerima bantuan baik secara jalur pendidikan formal (SD s/d SMA) maupun dengan melalui pendidikan informal dan non formal.

Kebijakan adalah keputusan yang bersumber dari seseorang, sekelompok orang atau pihak pemerintah yang berwenang dimana isi dari keputusan tersebut merupakan rentetan kegiatan yang saling terkait dan dilaksanakan demi pencapaian tujuan tertentu (Haerana, 2016). Implementasi kebijakan secara umum diartikan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah presiden atau dekrit presiden). Menurut (Rakista, 2020) implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa

dampak yang timbul dari program kebijakan tersebut. Sedangkan (Anugrah, 2019) menyatakan bahwa Implementasi kebijakan ialah suatu proses untuk menjalankan suatu kebijakan yang telah diambil. Implementasi juga diartikan sebagai semua tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan yang telah di tentukan terdahulu. Lebih lanjut (Saraswati, 2017) menyatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai suatu proses, suatu *output* (keluaran) atau suatu hasil *outcome* (akhir). Jika dilihat dari prosesnya, implementasi akan mengacu pada serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk sesegera mungkin menghasilkan akibat-akibat tertentu yang dikehendaki. Konsep keluaran implementasi mengacu pada cara-cara atau sarana yang telah dipakai untuk mencapai tujuan tertentu yang telah diprogramkan. Sedangkan yang dimaksud dengan hasil akhir implementasi ialah terjadinya perubahan-perubahan tertentu pada permasalahan sosial dalam skala luas yang ingin diatasi oleh suatu program.

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Program Indonesia Pintar pernah dikaji oleh (Astuti, 2016), dengan judul Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Tahun Ajaran 2015/2016 Di SMP Negeri 1 Semin. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa objek penelitian dilakukan di SMP Negeri 1 Semin menunjukkan dengan adanya program Kartu Indonesia Pintar mendukung pemerataan pendidikan siswa menjadi lebih aktif karena peralatan sekolah dapat terpenuhi, akan tetapi evaluasi program KIP yang dilaksanakan pada setiap periode menyebabkan terjadinya perubahan khususnya pada mekanismenya, penyelewengan dana KIP, kesulitan mengumpulkan kuitansi atau bukti penggunaan dana KIP, sehingga Sekolah diharapkan dapat mengelola data, arsip atau dokumen sekolah dan selalu menyiapkan backup data. Sehingga apabila suatu saat ditanyakan oleh peneliti atau pihak pelaksana kebijakan, sekolah dapat mempertanggungjawabkan tugas mereka.

Penelitian juga dilakukan oleh (Setyawan, 2018) terkait Program Indonesia Pintar dengan judul Evaluasi

Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Di SDN Magersari Kabupaten Rembang ditemukan bahwa pelaksanaan PIP di Kabupaten Rembang masih menemui hambatan dan kendala, seperti belum dapat tersalurkannya dana ke masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan atau salah dalam penyaluran kepada masyarakat yang sebenarnya tidak berhak. Hal ini disebabkan karena kendala administrasi dan sumber daya manusia. Sumber daya program PIP sangat perlu diperhatikan dari segi kualitas agar memberikan pelayanan terbaik kepada calon penerima PIP.

Searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2016) dan Setyawan (2018) terkait Program Indonesia Pintar juga dilakukan oleh (Anugrah, 2019) dengan judul Implementasi Program Indonesia Pintar Di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Di Sdn 1 Pelita Tanjung Karang Pusat Kec.Enggal). Pada penelitian ketiga ini penulis menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program Indonesia pintar di SDN 1 Pelita sudah baik hanya saja masih ada masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program ini seperti program ini masih tidak tepat sasaran, kesadaran orang tua terhadap pemanfaatan dana tersebut masih rendah disebabkan karena aspek

komunikasi antara orang tua murid dan sekolah serta masih rendahnya kesadaran orang tua terhadap pemanfaatan dana PIP.

Mengukur suatu implementasi menurut George Edward III dalam (Anugrah, 2019) menyebutkan bahwa ada empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor tersebut antara lain meliputi: (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi (4) Struktur Birokrasi. Indikator tersebut yang akan digunakan dalam mengamati efektifitas pengimplementasian program Indonesia Pintar di SMP Negeri 2 Maiwa Kabupaten Enrekang sehingga dapat menyimpulkan serta menguatkan penelitian. Hasil observasi awal di SMP Negeri 2 Maiwa Kabupaten Enrekang diperoleh data bahwa sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah yang menjadi sasaran Program Indonesia Pintar. Selama 6 tahun terhitung sejak 2015 sampai saat ini SMPN 2 Maiwa selalu aktif dalam proses pengimplementasian Program Indonesia Pintar. Pada tahun 2018 penerima bantuan PIP di sekolah tersebut sebanyak 46 siswa, tahun 2019 sebanyak 44, tahun 2020 sebanyak 86 siswa dan pada tahun 2021 sebanyak 84 siswa. Adanya Program Indonesia Pintar

diharapkan dapat diimplementasikan dengan tepat sesuai dengan aturan yang ada.

Meskipun telah melaksanakan Program Indonesia Pintar selama 6 tahun terakhir namun SMP Negeri 2 Maiwa masih menemui kendala dalam proses pengimplementasian. Secara teknis pelaksanaan Program Indonesia Pintar dimulai dari sosialisasi, pengusulan, pengumpulan berkas sampai penerimaan dana. Program ini rencananya diberikan kepada siswa yang bersyarat yaitu pemegang Kartu Indonesia Pintar yang merupakan syarat untuk menerima PIP ini namun pada kenyataannya tidak tepat sasaran. Rendahnya kesadaran orang tua dan penerima terhadap pemanfaatan dana PIP menyebabkan Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 2 Maiwa belum berjalan secara efektif karena ditiap pelaksanaannya masih saja menemui hambatan seperti yang disebutkan. Dengan banyaknya masalah, pihak sekolah selaku pelaksana harus berupaya lebih keras untuk memaksimalkan program tersebut. Data tersebut didapatkan dari hasil wawancara dengan salah staf SMP Negeri 2 Maiwa Kabupaten Enrekang dan diperkuat dengan wawancara dari salah satu orang tua penerima bantuan Program Indonesia Pintar yang

menyatakan bahwa pelaksanaan implementasi PIP masih kurang efektif. Berangkat dari masalah tersebut penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Indonesia Pintar Di SMP Negeri 2 Maiwa Kabupaten Enrekang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang selama 2 bulan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Informan pada penelitian ini berjumlah 13 orang. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, teknik dan waktu kemudian dianalisis melalui teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut Kartu Indonesia Pintar adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak atau kurang mampu dalam membiayai pendidikannya. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada

jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Pemberian bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar maupun bantuan pendidikan lainnya guna mendukung program Wajib Belajar bertujuan untuk meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua yang berasal dari status ekonomi bawah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah dan mencegah anak putus sekolah. Pemerintah memberikan bantuan pendidikan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi anak-anak miskin yang rawan putus sekolah agar dapat mencukupi kebutuhan pendidikan mereka. Pengalokasian dana bantuan ini sebesar Rp. 750.000,00 ditujukan untuk mencukupi kebutuhan pendidikan siswa di luar biaya operasional sekolah, misalnya untuk membeli perlengkapan sekolah, biaya transportasi, uang saku, dan lain-lain.

Komunikasi Implementasi Program Indonesia Pintar

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) komunikasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam

implementasi kebijakan publik. Semakin baik komunikasi dan koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitu pula sebaliknya. Komunikasi yaitu cara penyampaian informasi terkait peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pengimplementasian Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 2 Maiwa Kabupaten Enrekang. Informasi tersebut perlu disampaikan kepada penerima bantuan agar dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi tujuan maupun sasaran kebijakan tersebut. Hal ini bertujuan agar penerima bantuan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus disiapkan dan dilakukan agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran dapat tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan semua informan bahwa pemberian bantuan melalui Program Indonesia Pintar ini bertujuan untuk mendukung program Wajib Belajar dan untuk meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua yang berasal dari status ekonomi bawah. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah dan mencegah anak putus sekolah. Dari hasil penelitian di SMP

Negeri 2 Maiwa bahwa sudah adanya proses komunikasi mengenai informasi nama-nama penerima bantuan Program Indonesia Pintar. Pihak sekolah juga sudah melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa yang mendapatkan program bantuan PIP. Penyampaian informasi sangat penting dalam suatu kebijakan karena harus ada komunikasi yang baik agar program dapat berjalan dengan lancar dan baik sehingga bisa sesuai dengan tujuan dan sasarannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam hal penyampaian informasi terkait nama-nama penerima bantuan PIP kepada siswa masih kurang efektif. Hal ini dikarenakan dari semua siswa penerima bantuan PIP di sekolah masih ada yang tidak mengetahui namanya ada di daftar penerima KIP. Siswa yang tidak mengetahui namanya ada tersebut baru melakukan pencairan ketika mendekati proses pencairan berikutnya. Selanjutnya yaitu komunikasi terkait pemahaman tentang apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari kebijakan PIP sudah berhasil melalui proses sosialisasi yang baik dari pihak sekolah dengan orang tua siswa penerima PIP. Orang tua dan siswa menyadari tujuan dan sasaran penggunaan dana PIP.

Sumber Daya Implementasi Program Indonesia Pintar

Sumber daya mempunyai peranan penting dalam proses implementasi kebijakan. Sumber daya yaitu terkait persiapan pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 2 Maiwa. Adapun sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia dan sumber daya non manusia berupa sumber daya keuangan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya yang berkualitas yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan sumber daya waktu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan diketahui bahwa Sumber daya manusia yang dimiliki oleh SMP Negeri 2 Maiwa dalam melaksanakan

Implementasi Program Indonesia Pintar sudah terstruktur dengan baik mulai dari Kepala Sekolah, Wakasek Kesiswaan, Operator PIP, orang tua siswa, dan siswa penerima PIP. Adapun sumber daya non manusia berupa sumber daya keuangan tidak menjadi masalah karena PIP merupakan program yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dan non manusia terkait Implementasi Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 2 Maiwa sudah berjalan dengan baik, pihak sekolah sudah melaksanakannya dengan maksimal.

Disposisi Implementasi Program Indonesia Pintar

Disposisi pada implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar berhubungan dengan komitmen para pelaku atau pelaksana implementasi kebijakan tersebut. Disposisi disini merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh sehingga tujuannya dapat terwujud. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor penting terhadap implementasi kebijakan. Kecenderungan (*Disposition*) menurut Van Meter dan Van Horn (1975) merupakan sikap penerimaan

atau penolakan dari agen pelaksana yang mana banyak mempengaruhi berhasil atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan bahwa, semua pelaksana Program Indonesia Pintar yang terkait benar-benar memahami dan menerima kebijakan tersebut sehingga mampu melaksanakan implementasi kebijakan PIP dengan maksimal, dengan memberikan informasi kepada orang tua dan siswa. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa disposisi pada Implementasi Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 2 Maiwa sudah berjalan dengan baik dilihat dari bagaimana pihak pelaksana memberikan pelayanan dan informasi secara maksimal.

Struktur Birokrasi Implementasi Program Indonesia Pintar

Struktur Birokrasi menurut George C. Edward III yaitu susunan birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 2 Maiwa Kabupaten Enrekang. Struktur birokrasi mencakup

dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya. Struktur birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 2 Maiwa mencakup standar prosedur operasi atau struktur birokrasi itu sendiri yang memiliki peranan penting demi kelancaran Implementasi Program Indonesia Pintar.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para informan masih ada kekurangan dalam hal pelaksanaan implementasi yang berkaitan dengan proses pencairan dana, yang mana dalam proses pencairan tersebut melibatkan lebih dari satu struktur birokrasi yaitu pihak sekolah dan pihak penyalur (BRI). Masing-masing pihak memiliki standar operasional yang berbeda sehingga seringkali terjadi keterlambatan penyaluran dana Program Indonesia Pintar. Dari hasil wawancara juga ditemukan bahwa para penerima bantuan Program Indonesia Pintar tidak diprioritaskan oleh pihak Bank BRI sehingga mereka tetap harus antri lama bersama para nasabah yang lain. Selain itu juga biasanya terdapat data yang tidak sinkron dari pihak sekolah dan

pihak BRI yang menyebabkan penerima harus kembali untuk mengurus datanya.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Struktur Birokrasi Implementasi Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 2 Maiwa belum sepenuhnya berjalan dengan baik yang mana didalamnya melibatkan lebih dari satu struktur birokrasi yang masing-masing pihak memiliki standar operasional berbeda.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dihasilkan melalui wawancara dalam bab sebelumnya maka dapat disimpulkan, bahwa: (1) Komunikasi terkait Implementasi Program Indonesia Pintar jika dilihat dari proses penyampaian informasi terkait nama penerima bantuan PIP masih kurang efektif, tetapi jika dilihat dari proses penyampaian informasi melalui sosialisasi tentang tujuan dan sasaran penggunaan dana PIP sudah berjalan dengan baik. (2) Sumber Daya terkait Implementasi Program Indonesia Pintar sudah berjalan dengan baik, pihak sekolah sudah melaksanakan implementasi program ini dengan maksimal. (3) Disposisi terkait Implementasi Program Indonesia Pintar sudah berjalan dengan baik dilihat dari pihak pelaksana yang memberikan

pelayanan dan informasi secara maksimal. (4) Struktur Birokrasi terkait Implementasi Program Indonesia Pintar belum sepenuhnya berjalan dengan baik yang mana didalamnya melibatkan lebih dari satu struktur birokrasi yang masing-masing pihak memiliki standar operasional berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, R. (2019). *Implementasi Program Indonesia Pintar di Kota Bandar Lampung (Studi kasus di SDN 1 Pelita Tanjung Karang Pusat Kec. Enggal)* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung).
- Astuti, R. S. (2016). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Tahun Ajaran 2015/2016 Di SMP Negeri 1 Semin. *Jurnal Kebijakan Publik Edisi*, 2(6), 2.
- Bachtiyar, H. (2019). *Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar Di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Desa Donotirto Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul* (Skripsi, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa).
- Fatoni, F. (2019). *Implementasi Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat: studi kasus Penerima Program Indonesia Pintar di Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir Kota Surabaya* (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Indonesia, M. P. dan K. R. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar*.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2018). *Kajian Program Indonesia Pintar*.
- Lidia Lusiana. (2017). Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (Studi Kasus di SDN 011 dan SDN 013). *EJournal Administrasi Negara*, 6(1), 6991–7005.
- Rakista, P. M. (2020). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Banyumas). *Jurnal Administrasi Negara*, 8, 224–232.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Journal of Education Management and Administration Review*, 2(1), 1–12.
- Saraswati, L. N. (2017). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Sekolah Dasar Di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. *Administrasi Negara*, 5(4), 6738–6749.
- Scharfstein, M., & Gaurf. (2013). Implementasi Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di Smp 3 Satu Atap Gebog Kudus.

- Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Setyawan, D. M. (2018). Evaluasi Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Di SDN Magersari Kabupaten Rembang. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 1(3), 270–281.
<https://doi.org/10.15294/efficient.v1i3.27872>
- Widodo, B. (2016). *Evaluasi Pemanfaatan Program Indonesia Pintar Di SMK Cokroaminoto Pandak* (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta).
- Yusup, W. B., Ismanto, B., & Wasitohadi, W. (2019). Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam Peningkatan Akses Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(1), 44–53.
<https://doi.org/10.24246/j.jk.2019.v6.i1.p44-53>